

**PENGARUH KONDISI POLITIK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN
TAHUN 1945-1950**

Skripsi

Oleh

**NOVI HANDAYANI
NPM 1813033009**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH KONDISI POLITIK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1950

Oleh

NOVI HANDAYANI

Negara Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perubahan diantaranya pada kondisi politiknya. Berbeda dengan masa kolonial, setelah kemerdekaan kondisi politik Indonesia sudah dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga berpengaruh terhadap perubahan sistem pendidikan dari masa sebelumnya. Terdapat tiga komponen sistem pendidikan yang mengalami perubahan diantaranya yaitu input sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik), proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya pendidikan), dan output sistem pendidikan (lulusan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dengan teknik pengumpulan data teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka serta menggunakan teknik analisis data historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia tahun 1945-1950 yaitu: 1) pada input sistem pendidikan, dasar pendidikan berubah menjadi Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31, tujuan pendidikan disesuaikan ketika Indonesia sedang mengalami masa revolusi fisik yaitu mengutamakan patriotisme, peserta didik mengalami peningkatan, 2) pada proses sistem pendidikan, tenaga pendidik mengalami peningkatan, kurikulum disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia sehingga dikeluarkannya Rencana Pelajaran 1947, sarana prasarana pendidikan mengalami peningkatan gedung sekolah, administrasi pendidikan diselenggarakan oleh Kementerian PP dan K, biaya pendidikan diupayakan dengan memberikan keringanan dan beasiswa, 3) pada output sistem pendidikan (lulusan), menghasilkan penduduk Indonesia sebanyak 90% lulus SD serta negara Indonesia sudah mampu untuk mengeksport lulusan guru ke negara tetangga.

Kata kunci: kondisi politik, sistem pendidikan, awal kemerdekaan

ABSTRACT**THE EFFECT OF POLITICAL CONDITIONS ON THE EDUCATION SYSTEM IN INDONESIA AT THE BEGINNING OF INDEPENDENCE IN 1945-1950****By****NOVI HANDAYANI**

The Indonesian state after independence experienced changes, including in its political conditions. In contrast to the colonial period, after independence Indonesia's political conditions were already held by the Indonesian people themselves, thus influencing changes in the education system from the previous period. There are three components of the education system that have changed, including the input of the education system (basic education, educational goals, students), the process of the education system (educators, curriculum, infrastructure, administration, education costs), and the output of the education system (graduates). The formulation of the problem in this study is how the influence of political conditions on the education system in Indonesia at the beginning of independence in 1945-1950. The purpose of this study was to determine the influence of political conditions on the education system in Indonesia at the beginning of independence in 1945-1950. The method used in this study is the historical method, with data collection techniques, documentation techniques and literature study techniques and using historical data analysis techniques. The results of this study indicate that the influence of political conditions on the education system in Indonesia in 1945-1950, namely: 1) on the input of the education system, the basis of education changed to Pancasila as stated in Article 31 of the 1945 Constitution, the purpose of education was adjusted when Indonesia was experiencing a period of physical revolution, namely prioritizing patriotism, students have increased, 2) in the education system process, educators have increased, the curriculum is adjusted to the ideals of the Indonesian nation so that the 1947 Lesson Plan is issued, educational infrastructure facilities have increased in school buildings, education administration is organized by the Ministry of PP and K, the cost of education is sought by providing waivers and scholarships, 3) at the output of the education system (graduates), resulting in 90% of the Indonesian population graduating from elementary school and the Indonesian state has been able to export teacher graduates to neighboring countries.

Keywords: political conditions, education system, early independence

**PENGARUH KONDISI POLITIK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN
TAHUN 1945-1950**

Oleh

NOVI HANDAYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PENGARUH KONDISI POLITIK TERHADAP
SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA
AWAL KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1950**

Nama Mahasiswa : **Novi Handayani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1813033009**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP 198112252008121001

Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.
NIP 199010062015042001

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

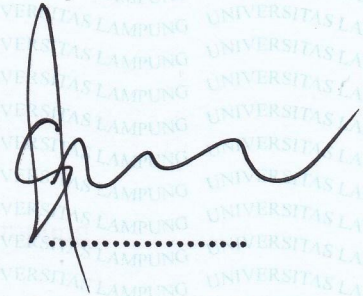
Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 196008261986031001

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP 198112252008121001

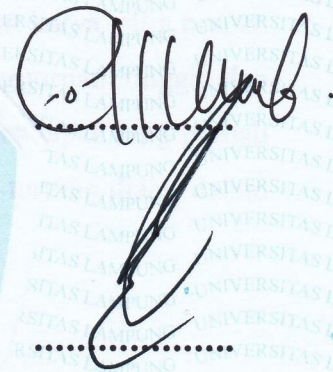
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris : Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Maskun, M.H.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP.19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Oktober 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Novi Handayani
NPM : 1813033009
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022



Novi Handayani
NPM 1813033009

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bukit Baru, pada tanggal 17 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nyamin dan Ibu Satinem. Pendidikan penulis dimulai dari TK Kridawacana (2005-2006). Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah dasar di SDN 1 Negara Bumi Udik (2006-2012). Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Terbanggi Besar (2012-2015), dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Terbanggi Besar (2015-2018). Pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), yang dilakukan tanpa tes tetapi menggunakan nilai rapor.

Pada semester V penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Dusun Bukit Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, pada semester V penulis juga melaksanakan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SDN 1 Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yaitu PERMATA SAKTI di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret. Selain itu, penulis aktif pada organisasi HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS) menjadi anggota bidang kerohanian (2018-2019). Penulis juga aktif dalam organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah) menjadi anggota bidang Hubungan dan Alumni (2019-2020). Kemudian, penulis juga aktif dalam organisasi luar kampus ELS (*English Learning Squad*) (2020).

MOTTO

“Hiduplah seolah engkau mati esok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai. Tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

“Orang Positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, ku persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Nyamin dan Ibu Satinem yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran. Terimakasih atas setiap tetes kerigat, dan selalu membimbing, serta mendoakanku agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan studi, mendoakan keberhasilanku, sungguh yang Bapak dan Ibu berikan tak mungkin bisa kubalaskan semuanya.

Untuk almamaterku tercinta
“UNIVERSITAS LAMPUNG”

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'aalamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul "*Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950*" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing utama, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing kedua, terima kasih Ibu atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Drs. Maskun, M.H., selaku penguji utama pada ujian skripsi, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
11. Bapak dan Ibu petugas di Kearsipan Nasional Republik Indonesia, terima kasih atas semua bantuannya dalam mencari sumber data arsip untuk menunjang penulisan skripsi penulis.
12. Teruntuk nenekku tersayang Mbah Kawit, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Teruntuk kakakku tersayang Mas Cahyono dan Mba Nur Fatma Indah, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Teruntuk keponakanku tersayang Arfan Hafizh Alfarizi, terima kasih untuk selalu menjadi penyemangat bagi penulis.

15. Teruntuk sahabatku di saat susah dan senang Ade Rannie Shabilla, Wulansuci Kurnia Dwianingsih, Sela Rima Puteri, Fitri Nur Hidayah, Sugiyanti, Cici Hardiyanti, Reza Pina Lestari, terima kasih atas kebersamaannya dan menjadi tempat berkeluh kesah selama masa perkuliahan ini dan terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
16. Teruntuk sahabat kuliahku Mia Oktavia, Ratih Juniarti, Ayu Fitri Anggraini, Istiqomah, Meilia Anggraini, Erika Sukma Lestari, Dwi Mawarni, Novita Sari, terima kasih banyak telah menjadi sahabat dan tempat curhat yang selalu membantu selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
17. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, semua kenangan manis, cinta dan kebersamaan yang tidak akan pernah penulis lupakan selama melaksanakan kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Sejarah tercinta ini.
18. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022

Novi Handayani
NPM 1813033009

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Kerangka Berpikir	6
1.6 Paradigma	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Konsep Pengaruh	9
2.1.2 Konsep Politik	10
2.1.3 Konsep Pemerintahan	12
2.1.4 Konsep Sistem Pendidikan	14
2.1.5 Konsep Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem- Pendidikan	19
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	21
III. METODE PENELITIAN	-
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	23
3.1.1 Objek Penelitian	23
3.1.2 Subjek Penelitian	23
3.1.3 Tempat Penelitian	23
3.1.4 Waktu Penelitian	23
3.1.5 Konsentrasi Ilmu	23
3.2 Metode Penelitian	24
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3.1 Teknik Dokumentasi	29
3.3.2 Teknik Studi Pustaka	30
3.4 Teknik Analisis Data	30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil	32
4.1.1 Kondisi Politik di Indonesia Tahun 1945-1950	32
4.1.1.1 Kondisi Politik Terkait Pendidikan di Indonesia- Tahun 1945-1950	37
4.1.1.1.1 Menteri Pendidikan Tahun 1945-1950	43
4.1.2 Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di- Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950	45
4.1.2.1 Input Sistem Pendidikan	47
4.1.2.1.1 Dasar Pendidikan	47
4.1.2.1.2 Tujuan Pendidikan	48
4.1.2.1.3 Peserta Didik	50
4.1.2.2 Proses Sistem Pendidikan	51
4.1.2.2.1 Pendidik	51
4.1.2.2.2 Kurikulum	53
4.1.2.2.3 Sarana Prasarana	63
4.1.2.2.4 Administrasi	65
4.1.2.2.5 Biaya Pendidikan	66
4.1.2.3 Output Sistem Pendidikan	68
4.1.2.3.1 Lulusan	68
4.2 Pembahasan	70
4.2.1 Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di- Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950	70
4.2.1.1 Input Sistem Pendidikan	72
4.2.1.1.1 Dasar Pendidikan	72
4.2.1.1.2 Tujuan Pendidikan	72
4.2.1.1.3 Peserta Didik	73
4.2.1.2 Proses Sistem Pendidikan	74
4.2.1.2.1 Pendidik	74
4.2.1.2.2 Kurikulum	75
4.2.1.2.3 Sarana Prasarana	78
4.2.1.2.4 Administrasi	79
4.2.1.2.5 Biaya Pendidikan	79
4.2.1.3 Output Sistem Pendidikan	81
4.2.1.3.1 Lulusan	81

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	83
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perubahan Nama Kementrian Pendidikan Tahun 1945-1950.....	43
2. Periodisasi Kementrian Pendidikan Indonesia Tahun 1945-1950	44
3. Jumlah Guru di Indonesia Tahun 1940/1945-1950/1951	52
4. Jumlah Gedung Sekolah di Indonesia Tahun 1940/1945-1950	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan pendidikannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka (Umar, 2013:166). Praktek pendidikan kolonial menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak rakyat biasa. Kesempatan luas hanya diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan yang dibuat demi kepentingan penjajah untuk dapat terus melangsungkan penjajahannya seperti menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia (Haryanah, 2004:540).

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia dengan gamblang menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Umar, 2013:166).

Perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia dimulai sejak diproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia (Ismail, 2016:143). Bangsa Indonesia melalui proklamasi menyatakan kemerdekaannya secara formal kepada bangsa sendiri dan dunia internasional. Merdeka bermakna bahwa sejak itu bangsa Indonesia mampu menentukan nasibnya dan tanah airnya dalam setiap aspek kehidupan (Rinardi, 2017:145).

Sebagai negara yang independen, maka bangsa Indonesia perlu menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut disusunlah sebuah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya (Ismail, 2016:144). Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Soetarno, 2003:2).

Tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai membuat pendidikan yang merupakan upaya merancang masa depan umat manusia dalam konsep maupun implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran, dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia (Umar, 2013:167).

Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak terlepas dari pengaruh kondisi politik bangsa saat itu. Selama masa mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1950 bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kondisi pemerintahan dan keamanan yang belum stabil (Palupi dan Dyah, 2018:6). Indonesia yang masih gamang dalam menjalankan roda pemerintahan, melatarbelakangi para pemimpin bangsa bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Para tokoh-tokoh bangsa berhasil menetapkan dasar negara, konstitusi negara, dan memilih pemimpin bangsa secara aklamasi yakni Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Dalam periode politik yang penting ini, berlaku baik sistem Presidensialisme maupun Parleментарisme (Zulkarnain, 2009:2).

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka hal yang diutamakan tentu membangun tata kelola negara yang baik. Terlebih sejak proklamasi

kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Belanda terlihat bersikukuh untuk kembali menjajah Indonesia melalui pendudukan militer di beberapa tempat dibantu tentara Inggris setelah berhasil meminta Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Perlawanan bersenjata pun terjadi pada Oktober, November, hingga Desember 1945 di Jawa dan akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Selain itu beberapa perlawanan masih terjadi di beberapa tempat di Sumatera, Bali, dan lainnya. Gesekan antar-faksi perjuangan kemerdekaan juga terjadi, ditambah upaya Belanda untuk memaksakan diwujudkannya negara federasi (Ricklefs, 2005:428-468).

Kondisi negara yang belum stabil tersebut tidak menghalangi pemerintah dan tokoh-tokoh bangsa untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar dapat memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Upaya tersebut dimulai dengan melakukan berbagai perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka (Djojonegoro, 1996:72). Penyesuaian tersebut mengakibatkan bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya semua elemen masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan, dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (Dangu, Sumarjiana, & Anto, 2022:3).

Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara (Moestoko, 1986: 145). Pendidikan difokuskan sebagai upaya membangun karakter bangsa. Nuansa pendidikan banyak diwarnai oleh semangat patriotisme dan menanamkan rasa cinta pada tanah air. Bahkan, Romo Mangun memuji pendidikan pada masa ini karena mampu mengikis model pendidikan yang feodalistis (Pradipto, 2007:223). Sehingga, sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 1945-1950 memiliki peran penting dalam

perkembangan pendidikan karena merupakan dasar bagi perkembangan pendidikan Indonesia masa selanjutnya. Selain itu, sistem pendidikan ini juga merupakan sistem pendidikan pertama setelah Indonesia merdeka dan disusun atas kehendak bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks pendidikan nasional, yakni pendidikan yang dikoordinasi oleh pemerintah dalam sebuah negara pasti didasari oleh kondisi politik tertentu. Kemudian, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bahwa periode tahun 1945-1950 terjadi perubahan drastis yang menarik jika ingin mengetahui kondisi politik yang memengaruhi sistem pendidikan nasional. Kajian sejarah pada periode tersebut tidak banyak yang menganalisis dimensi politik serta pengaruhnya bagi arah pengembangan sistem pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keterkaitan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi politik negara sangat berperan menentukan perubahan sistem pendidikan di suatu negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, diantaranya yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep-konsep kesejarahan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian yaitu mengenai kondisi politik dan pemerintahan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada saat itu.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai sistem pendidikan di Indonesia awal kemerdekaan, meliputi sistem pendidikan awal kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan dapat menjadi salah satu, dasar, acuan, dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan dan sebagai referensi agar mengetahui tentang sistem pendidikan Indonesia awal kemerdekaan, meliputi sistem pendidikan awal kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi politik.

3. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai sistem pendidikan Indonesia awal kemerdekaan, meliputi sistem pendidikan awal kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi politik.

4. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan, meliputi sistem pendidikan awal kemerdekaan Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi politik.

1.5 Kerangka Berpikir

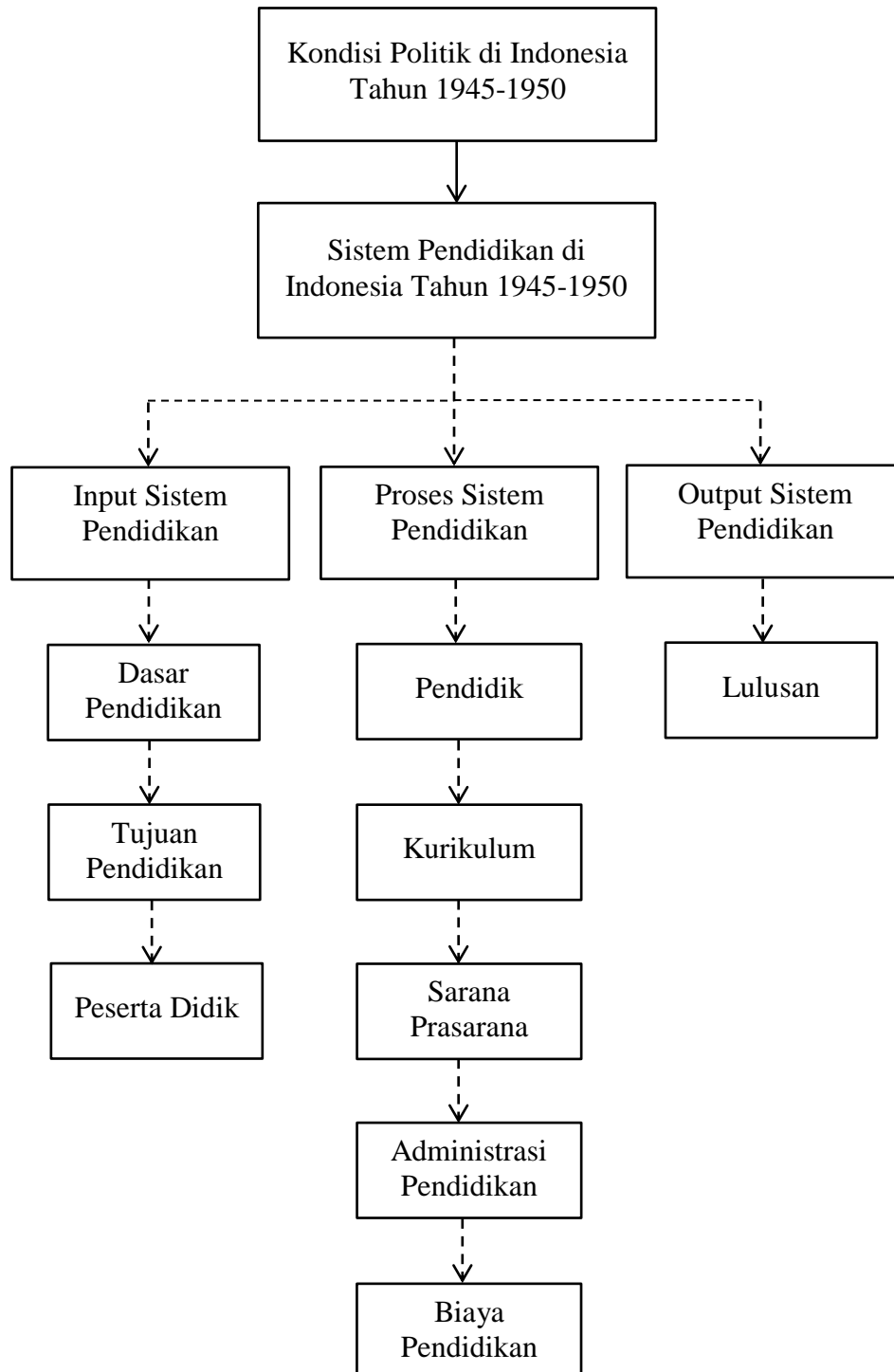
Kerangka pikir ini akan dikembangkan oleh peneliti yaitu tentang pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950. Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak terlepas dari pengaruh kondisi politik bangsa saat itu. Selama masa mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1950 bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kondisi politik dan keamanan yang belum stabil. Tetapi, dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap semangat untuk terus berusaha melakukan perubahan, salah satunya mengenai sistem pendidikan Indonesia agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Sehingga, pasca kemerdekaan pendidikan Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, salah satunya terdapat pada pasal 31 UUD 1945 telah mengatur mengenai sistem pendidikan di Indonesia.

Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah Indonesia merdeka, mengeluarkan Instruksi Umum yang isinya menyerukan kepada para pengurus supaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Sehingga, sistem pendidikan Indonesia berbeda dari masa kolonial dengan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kondisi politik saat Indonesia merdeka sudah dipengang oleh pemerintahan Indonesia sendiri, sehingga berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang ikut mengalami perubahan. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Astutik, Wartoyo dan Widodo (2009) yang menjelaskan kondisi politik pada masa revolusi kemerdekaan berpengaruh langsung terhadap situasi pendidikan maupun perubahan sistem pendidikan dari masa sebelumnya. Kemudian, penelitian dari Susanto (2016) bahwa pengaruh politik terhadap pendidikan salahsatunya yaitu politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti yang dibutuhkan oleh negara. Selain itu, penelitian dari Asrori (2015) menjelaskan bahwa pada awal kemerdekaan pengaruh kondisi politik terhadap pendidikan dapat dilihat dari pemerintahan RI belum secara maksimal mengupayakan

pendidikan pada rakyatnya, karena beban politis yang besar serta perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sangat menguras tenaga maupun pikiran pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejolak politik yang cukup berat itu, pendidikan tetap dilaksanakan dalam kondisi yang *elementary* atau sederhana.

Dengan demikian, kondisi Indonesia yang sudah merdeka berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Dimana, menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005), di dalam sistem pendidikan terdapat komponen-komponen yang saling terkait secara terpadu diantaranya yaitu input sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik), proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya pendidikan), dan output sistem pendidikan (lulusan). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi politik saat Indonesia sudah merdeka berpengaruh terhadap perubahan sistem pendidikan diantaranya yaitu berpengaruh terhadap dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya pendidikan, dan lulusan.

1.6 Paradigma



Keterangan :

—————> Sebab

- - - - -> Akibat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Pengaruh

Pengaruh dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Suharno dan Retnoningsih, 2006:243). Kemudian, definisi pengaruh menurut Hugiono dan Poerwantana yaitu, "pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek". Sedangkan menurut Badudu dan Zain, "pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain". Selanjutnya, menurut Louis Gottschalk, pengaruh didefinisikan sebagai suatu efek yang tegas dan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif (Afdhal, 2021:5).

Pengaruh juga dapat didefinisikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Hoetomo, 2005:849). Kemudian, menurut Surakhmad (1982:7), pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Selain itu, definisi pengaruh menurut Wiryanto (2004:79), pengaruh merupakan tokoh formal maupun informal di dalam masyarakat, mempunyai ciri lebih kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi.

Dengan demikian, berdasarkan definisi pengaruh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu sebab yang berdampak pada munculnya suatu akibat, kemudian dapat memengaruhi atau berdampak pada suatu hal yang lainnya sehingga menimbulkan suatu hasil. Kemudian, jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka pengaruh merupakan suatu keadaan dimana kondisi politik yang memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950.

2.1.2 Konsep Politik

Menurut Deliar Noer (1983:6), politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas. Di dalam definisi Deliar Noer, kata negara atau sistem politik tidak ditemukan, tapi yang ada yaitu bentuk susunan masyarakat, hal mana dapat diketahui sebagai ungkapan yang berkenaan dengan penguasaan, sifat dan struktur masyarakat yang dikehendaki. Dalam hubungan, Deliar Noer menunjukkan adanya fakta sejarah sebagai perkembangan politik yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan.

Sehingga, dari kenyataan sejarah itu terlihat adanya usaha-usaha dalam masyarakat dari golongan warga untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan segolongan lain berusaha mempertahankannya. Hal ini pada zaman penjajahan Belanda dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Sedangkan setelah kemerdekaan tercapai kekuatan kekuasaan politik berusaha mendapatkan kekuasaan dan mereka berhasil mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan

pandangan hidup mereka sendiri atau dimiliki bersama. Dengan kekuasaan politik di tangan kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau bersama, mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai dengan nilai-nilai bersama (Nambo & Puluhuluwa, 2005:267).

Kemudian, menurut Miriam Budiardjo (1982:8), politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik menurut Miriam Budiardjo (2008:15) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.

Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti mengenai arti politik (1992:1-8), dalam pandangan klasik menurut Aristoteles melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, dasar moral tertinggi terdapat pada urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta.

Dalam pandangan fungsionalisme, David Easton merumuskan politik sebagai "*the authoritative allocation of values for a society*", atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton kemudian menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan Harold Laswell memandang proses politik sebagai masalah *who gets what*,

when, how, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa, artinya mendapat nilai-nilai. Kapan, berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian tentang politik di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa terhadap warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi (mengubah) nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan kondisi politik merupakan keadaan penyelenggara negara pada saat tertentu, yang sedang berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat sesuai dengan nilai-nilai bersama, sehingga dapat diterima baik untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang lebih baik. Kemudian, jika dihubungkan dengan penelitian ini maka politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan bersama dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kondisi politiknya yaitu keadaan Indonesia setelah kemerdekaan tercapai, dimana kekuatan kekuasaan politik Indonesia berusaha mempertahankan kekuasaan dan mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup yang dimiliki bersama (cita-cita bersama), seperti sistem pendidikan pada saat itu yang berubah tujuannya dari yang sebelumnya untuk kepentingan kolonial menjadi sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan bangsa Indonesia.

2.1.3 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya (Manan, 2001:100).

Menurut Sri Maulidiah (2014:1), pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Jellinek pemerintahan mengandung dua arti, yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur dan kekuasaan memutus sedangkan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur yaitu memerintah dan melaksanakan (Agustina, 2014:172).

Menurut Ndraha (2003:6), pemerintahan didefinisikan sebagai pihak berwenang yang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu pemerintahan adalah sebuah sistem multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1963:28).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat. Beda halnya dengan pemerintah dalam arti sempit Dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan di tataran eksekutif (Adiwilaga, Alfian & Rusdia, 2018:4).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan bagi segenap warga masyarakat atau segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), dimana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan yang kesemuanya dijamin dan diatur bersama dalam dasar negara dan undang-undang. Kemudian, jika dihubungkan dengan penelitian ini maka pemerintahan merupakan penyelenggara negara yang berusaha memperbaiki sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan bersama pada bidang pendidikan, dipengaruhi oleh kondisi politik di Indonesia yang baru saja merdeka pada tahun 1945-1950.

2.1.4 Konsep Sistem Pendidikan

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang artinya: suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian (*whole compounded of several parts*). Di antara bagian-bagian itu terdapat hubungan yang berlangsung secara teratur (Amirin, 1886:11).

Definisi sistem yang lain dikemukakan Hasbullah sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Di dalam sistem itu ada tujuan, proses, dan berbagai unsur atau komponen untuk mewujudkannya (Hasbullah, 2006:123).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan (Supendi, 2016:165).

Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan (Soetarno, 2003:2).

Pada sistem pendidikan, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Tujuan pada sistem pendidikan yaitu manusia Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir batin, dan

meningkatkan perannya sebagai pribadi, warga masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan (Fitriani, 2016:17). Komponen-komponen dalam sistem pendidikan merupakan semua komponen yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang kesemuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi (Hidayat & Abdillah, 2019:74).

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005:61), komponen-komponen dalam sistem pendidikan diantaranya yaitu input pada sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik), proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya pendidikan) dan output pada sistem pendidikan (lulusan), dimana secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Input Pada Sistem Pendidikan

Input pokok dalam sistem pendidikan adalah dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik.

- Dasar pendidikan

Pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan anak didik dengan melibatkan sebagai faktor pendidikan lainnya, diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa di dasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah yang kemudian disebut sebagai dasar pendidikan.

- Tujuan Pendidikan

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditunjukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan tujuan pendidikan diharapkan terbentuknya manusia yang utuh dengan memperhatikan aspek jasmani dan rohani, aspek diri (individualitas) dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, serta keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris) dengan lingkungan sosial dan alamnya (horizontal) dan dengan Tuhannya (vertikal).

- Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik (tanpa pandang usia) adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya dan ingin mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik adalah: (1) individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik (2) individu yang sedang berkembang (3) individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi (4) individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

b. Proses sistem pendidikan

Proses sistem pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling bergantung. Adapun komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan adalah sebagai berikut:

- Pendidik

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 1, menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Kemudian, menurut Marimba (Hasbullah, 2012:17), pendidik ialah orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik. Pendidik juga bisa diartikan tenaga yang menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- Kurikulum

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut-

Timotius (Rohman, 2009:168) kurikulum merupakan program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

- Sarana Prasarana

Menurut Soetjipto dan Kosasih (2009:170) sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana prasarana merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.

- Administrasi

Menurut Purwanto (1989:50) mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik, baik personal, spiritual dan material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan.

- Biaya Pendidikan

Mulyasa (2002:167) menjelaskan bahwa biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

c. Output pada sistem pendidikan

Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi didalam sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan yaitu lulusan. Lulusan pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Diharapkan lulusan yang dihasilkan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan yang nyata bagi dirinya, lingkungan dan Tuhannya. Setidaknya, lulusan tersebut dapat

mentransformasikan (mengembangkan dan melestarikan) budaya yang ada di lingkungan, kepribadiannya dapat terbentuk dengan baik, menjadi warga negara yang baik yang didasarkan atas landasan-landasan pendidikan, serta mampu bersaing di dunia kerja. Jika proses yang terjadi di dalam komponen-komponen pendidikan yang sudah dijelaskan di atas berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan maka hasil lulusan tersebut pun akan baik. Oleh sebab itu, proses berkesinambungan dari komponen-komponen pendidikan menentukan hasil nyata dari pendidikan tersebut yang didasarkan pada tujuan dan dasar pendidikan (Fitriani, 2016:26).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan merupakan seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, seperti input sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik), proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya pendidikan), dan output sistem pendidikan (lulusan). Komponen-komponen tersebut dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kondisi politik saat Indonesia sudah merdeka memiliki pengaruh yang berbeda dengan masa kolonial, karena kondisi politik yang sudah dipegang oleh pemerintahan Indonesia sendiri, sehingga pengaruhnya yaitu pada sistem pendidikan yang mencakup berbagai komponen dapat mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia agar masyarakat mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir batin, dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, warga masyarakat, warga negara Indonesia.

2.1.5 Konsep Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan

Kondisi politik pada masa revolusi kemerdekaan berpengaruh langsung terhadap situasi pendidikan maupun perubahan sistem pendidikan dari masa sebelumnya (Astutik, Wartoyo, & Widodo, 2009:43). Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat

berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara (Purwanto, 2008:2). Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Susanto (2016) bahwa pengaruh politik terhadap pendidikan salahsatunya yaitu politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti yang dibutuhkan oleh negara. Kemudian, penelitian dari Asrori (2015) menjelaskan bahwa pada awal kemerdekaan pengaruh kondisi politik terhadap pendidikan dapat dilihat dari pemerintahan RI belum secara maksimal mengupayakan pendidikan pada rakyatnya, karena beban politis yang besar serta perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sangat menguras tenaga maupun pikiran pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejolak politik yang cukup berat itu, pendidikan tetap dilaksanakan dalam kondisi yang *elementary* atau sederhana.

Menurut Sirozi (2005) pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik suatu Negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Senada dengan itu, Freire (2000) juga mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Kemudian, Nir dan Kafle (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa stabilitas politik memainkan peran utama dalam menjelaskan tingkat kelangsungan hidup dalam pendidikan.

Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, dan telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional (Syaharuddin & Susanto, 2019). Tujuan dari pendidikan pada jaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik. Pada kondisi ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat

UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan “Intruksi Umum” agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan komisi ini membentuk Panitia Perancang Undang-Undang (RUU) mengenai pendidikan dan pengajaran (Datumula, 2020:56-78).

Kondisi Indonesia yang sudah merdeka berpengaruh terhadap sistem pendidikan (Kumalasari, 2010:52). Dimana, menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005), sistem pendidikan diantaranya yaitu input sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik), proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya), dan output sistem pendidikan (lulusan). Dengan demikian, kondisi politik saat Indonesia sudah merdeka berpengaruh terhadap sistem pendidikan diantaranya yaitu berpengaruh terhadap dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, biaya, dan lulusan.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis pada penelitian terdahulu antara lain adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Susanto (2016) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional”. Pada penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pada politik hukum yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan nasional. Kajian pembahasan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu: politik hukum dalam sistem pendidikan nasional, serta pengaruh sistem politik terhadap sistem pendidikan.

Perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Susanto (2016) dengan penelitian yang hendak peneliti kaji antara lain: Persamaan, pada penelitian yang akan peneliti laksanakan dengan penelitian terdahulu (Karya Susanto) yakni sama-sama membahas pengaruh politik terhadap sistem pendidikan. Kemudian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Karya Susanto) adalah pada kajian penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dikaji oleh Susanto (2016) membahas pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional menggunakan landasan keilmuan bidang hukum dan mengkaji pada masa reformasi. Sedangkan untuk peneliti sendiri menggunakan landasan keilmuan sejarah atau historis yang mengkaji pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan khusus mengkaji pada masa awal kemerdekaan tahun 1945-1950.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain: objek penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, dan bidang ilmu yang dianggap sesuai dengan isi penelitian. Penelitian ini berjudul: Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950.

3.1.1 Objek Penelitian

Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950.

3.1.2 Subjek Penelitian

Kondisi politik pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950.

3.1.3 Tempat Penelitian

- a) Perpustakaan Universitas Lampung
- b) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- c) Arsip Nasional Republik Indonesia

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2022.

3.1.5 Konsentrasi Ilmu

Konsentrasi penelitian ini adalah ilmu sejarah.

3.2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata "*Methodos*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "*Logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Narbuko dan Achmadi, 2012:7).

Tentang istilah "Penelitian" banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya, seperti David H. Penny: Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi MA, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Sukandarrumidi, 2006:3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis atau metode sejarah, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Metode sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya.

Metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan

yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “*sinthese*” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Garraghan, 1948:33).

Metode sejarah ini merupakan alat yang sangat penting, karena tanpa metode penelitian sejarah tidak akan efektif, dan barangkali dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. John C. Almack memberikan denisi tentang metode sejarah secara umum adalah, cara untuk menemukan cirri-ciri yang logis untuk dapat mengkonfirmasi dan menguraikan kebenaran (Zulaicha, 2007:4).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dalam penelitian sejarah akan membahas tentang penelitian sumber, kritik sumber, sintesis sampai kepada penyajian hasil penelitian. Semua kegiatan atau proses ini harus mengikuti metode dan aturan yang benar. Dengan demikian metode sejarah sebagaimana disebutkan diatas adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.

Adapun langkah paling awal yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Adapun topik penelitian sejarah harus menarik (*interesting topic*), harus memiliki keunikan (*uniqueness topic*), memiliki arti penting (*significant topic*) dan memungkinkan untuk diteliti (*manageable topic*). Adapun penelitian dengan menggunakan metode sejarah terdapat beberapa tahap yang wajib dilakukan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Herdiani, 2016:37).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menentukan topik yaitu mengenai pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950. Topik tersebut dipilih oleh penulis

karena pendidikan pada awal kemerdekaan merupakan tonggak awal bagi perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga memiliki peran yang amat penting. Dengan demikian topik tersebut merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji.

Dari langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian historis yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, maka perlu diadakannya deskripsi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun deskripsi yang akan dilakukan dari langkah-langkah metode penelitian historis tersebut, antara lain:

1. Heuristik

Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber untuk dijadikan bahan-bahan penelitian. Pada tahap ini juga, peneliti dituntut ketelatenan, kesabaran, dan ketelitian. Oleh sebab itu perlu menyiapkan waktu, biaya, tenaga, pikiran untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber yang otentik sebagai bukti merangkai sebuah kisah sejarah. Pada tahap ini diperlukan testimoni atau kesaksian sebagai informan yang penting. Adapun sumber sejarah menurut bentuknya diklasifikasikan menjadi tiga di antaranya, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artepak (Gottschalk, 1975: 35-36).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan sumber tertulis. Sumber-sumber yang dimaksud berupa buku maupun dokumen baik dalam bentuk tercetak maupun non-cetak (*e-book*), serta jurnal-jurnal sejarawan yang relevan dengan judul penelitian. Sumber tertulis yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Lampung. Peneliti juga menggunakan perpustakaan digital, meliputi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian, mengumpulkan sumber digital menggunakan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk jurnal peneliti menggunakan

jurnal melalui *Indonesian Onesearch* dan *google cendekia*, serta *e-book* peneliti menggunakan *google library*.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu mengkritisi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk dibuktikan otentisitas dan kredibilitasnya. Dalam kritik ini diperlukan kritik internal maupun eksternal. Tujuan dilakukan kritik adalah untuk mencari kebenaran (*truth*), di mana peneliti harus dapat membedakan apa yang benar dan tidak benar atau palsu, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Peneliti harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya bahkan juga sering kali harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu atau skeptis, percaya begitu saja, menggunakan akal sehat dan melakukan tebakan. Fungsi kritik untuk dapat mempertanggungjawabkan temuannya untuk dapat dipercaya masyarakat luas. Kritik sumber ini dilakukan terhadap sumber pertama yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber tersebut (Sjamsuddin, 2007: 132).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis melakukan kritik sumber dengan peneliti mengambil informasi-informasi yang memang tepat dan diperlukan berdasarkan sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dilakukan untuk menghindarkan penulis dari manipulasi data. Kritik sumber intern menunjukkan pada keaslian isi buku, arsip, dan jurnal yang peneliti gunakan, sedangkan kritik ekstern menunjukkan pada penelitian fisik atau bentuk buku yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah kegiatan untuk menafsirkan fakta-fakta juga menentukan makna dan saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Dengan kata lain interpretasi dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak masa lampau tersebut untuk masuk pada suasana masa lampau yang diteliti. Interpretasi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, karena di sini berhubungan erat dengan imajinasi

si penulis itu sendiri, sehingga orang banyak berargumen bahwa di sinilah sumber subjektivitas. Tanpa penafsiran sejarawan, data tidak dapat berbicara. Untuk itu pada tahap ini diperlukan kejujuran dari peneliti di mana mengungkapnya sesuai dengan fakta. Banyak kasus yang menjeruskan idealisme para peneliti karena dikaitkan dengan kepentingan golongan, kelompok atau pribadi. Demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongan mampu mengorbankan kejujuran juga idealisme para sejarawan (Herdiani, 2016:41).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha dengan cermat untuk menarik isi dari setiap dokumen. Penulis tidak mempunyai ambisi lain kecuali melihat fakta secara jelas dan mengambil makna dengan tepat. Sehingga penulis berusaha menganalisis secermat mungkin setiap sumber arsip, buku, maupun jurnal, kemudian menginterpretasi dengan berdasarkan ketentuan yang tepat, dan tidak menulis atau berpikir kecuali dalam keserasian dengan sumber tersebut.

4. Historiografi

Historiografi adalah menyampaikan hasil rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya tulis menjadi sebuah kisah sejarah. Oleh sebab itu, kemampuan dalam menulis sangat dibutuhkan, dalam arti kemahiran “*art of writing*” tidak boleh diabaikan (Herlina, 2008:15-16).

Berdasarkan uraian di atas, pada tahapan historiografi, penulis menuangkan tulisan yang merupakan hasil dari penafsiran dari fakta-fakta yang telah diperoleh menjadi sebuah kisah sejarah yang selaras. Penulisannya tidak berbeda dengan karya-karya ilmiah yang lain yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Riduwan (2010:51), didefinisikan sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan, menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) pengertian teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data dalam penelitian ilmiah merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

3.3.1 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, teknik dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian (Yusuf, 2014:34).

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian (Dimiyati, 2013:25). Dokumen dapat berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Hamidi, 2004:72).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan sumber informasi melalui fakta yang tersimpan dalam arsip-arsip, buku, artikel serta jurnal untuk mendapatkan sumber fakta berupa teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang

dilakukan yaitu “Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950”.

3.3.2 Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999:85).

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988:93). Serta menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2012:291).

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dalam melakukan teknik kepustakaan dilakukan untuk pencarian informasi yang lebih mendalam terkait penelitian tentang pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, menggunakan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti dokumen berupa buku, artikel dan jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain (Moleong, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Menurut Helius Sjamsuddin (1996: 89), teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992:2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian.

Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai data yang diinginkan sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan kemudian di seleksi, diklarifikasi dan ditafsirkan, baru kemudian merangkaikan fakta-fakta tersebut untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950 sebagai berikut:

- 1) Input sistem pendidikan (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik).
 - a) Pengaruh kondisi politik terhadap input sistem pendidikan pada dasar pendidikan yaitu setelah kemerdekaan dasar pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sehingga pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi: 1). Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, 2). Pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU.
 - b) Pengaruh kondisi politik terhadap input sistem pendidikan pada tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga tujuan pendidikannya mengutamakan patriotisme.
 - c) Pengaruh kondisi politik terhadap input sistem pendidikan pada peserta didik yaitu terjadinya peningkatan pada jumlah peserta didik karena adanya perubahan kebijakan pendidikan dengan memberi kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Proses sistem pendidikan (pendidik, kurikulum, sarana prasarana, administrasi, dan biaya pendidikan).
 - a) Pengaruh kondisi politik terhadap pendidik yaitu permasalahan mengenai kekurangan tenaga pendidik semakin meningkat sehingga untuk mengatasinya, Kementrian PP dan K menyelenggarakan pendidikan guru.
 - b) Pengaruh kondisi politik terhadap kurikulum pendidikan yaitu Kementrian PP dan K mengeluarkan

kurikulum pertama yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. c) Pengaruh kondisi politik terhadap sarana prasarana yaitu adanya penambahan jumlah gedung sekolah akibat usaha-usaha dari pemerintah dan masyarakat. d) Pengaruh kondisi politik terhadap administrasi pendidikan yaitu setelah Indonesia merdeka, pemerintah menugaskan Kementerian PP dan K sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi pendidikan di Indonesia. e) Pengaruh kondisi politik terhadap biaya pendidikan yaitu pemerintah berupaya meringankan biaya pendidikan serta memberikan tunjangan belajar (beasiswa).

- 3) Output sistem pendidikan (lulusan). Kondisi politik berpengaruh terhadap lulusan yaitu penduduk Indonesia sebanyak 90% dapat lulus SD, kemudian negara Indonesia sudah mampu untuk mengeksport lulusan guru ke negara tetangga dan banyak pemuda yang berhasil disekolahkan ke luar negeri.

Dengan demikian, kondisi politik yang belum stabil di Indonesia pada awal kemerdekaan, berpengaruh terhadap perkembangan sistem pendidikan. Akan tetapi pengaruhnya tidak secara mutlak, karena dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu sistem pendidikan di Indonesia meliputi input, proses, dan output pada awal kemerdekaan terus berkembang ke arah yang lebih baik walaupun peningkatannya tidak terlalu banyak. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor lain yang membuat sistem pendidikan Indonesia terus maju, diantaranya yaitu karena kebijakan terkait masalah pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tetap harus dijalankan walaupun dalam kondisi yang *urgent* atau secara sederhana sehingga hal tersebut tidak menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, adanya faktor luar berupa bantuan-bantuan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kondisi politik pemerintahan yang belum stabil pada awal kemerdekaan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950”, agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak hanya mengenai pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan tahun 1945-1950, tetapi dapat mengkaji pengaruh kondisi politik terhadap sistem pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat lebih memahami tentang kajian mengenai “Pengaruh Kondisi Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode penelitian sejarah*. Yogyakarta: Logos Wacana.
- Adwilaga, R., Alfian, Y., & Rosdia, U. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Agung, L. (2015). *Sejarah kurikulum sekolah menengah di Indonesia: sejak Kemerdekaan hingga Reformasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Ahmadi. (1987). *Pendidikan dari masa ke masa*. Bandung: CV Armico.
- Amirin, T. (1886). *Pengantar sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Apple, M. (2004). *Ideology and curriculum* (3th ed.). New York & London: Routledge Falmer.
- Arta, K. S. (2015). *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Astomo, P. (2014). *Hukum tata negara: teori dan praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Astutik, W., Wartoyo, F. X., & Widodo, J. P. (2009). *Sistem pendidikan Indonesia pada masa revolusi politik kemerdekaan (1945-1950)*. Surakarta: Pelangi Press.
- Budiardjo, M. (1982a). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chatim, N. (2006). *Hukum tata negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Cholisin. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan & aplikasinya pada pendidikan anak usia dini (paud)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djojonegoro, W. (1996). *50 tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).
- Djumhur, I. & Saputra, D. (1979). *Sejarah pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Freire, P. (2000). *Politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan*. Terjemahan Agung dan Fuad. Yogyakarta: Read dan Pustaka Pelajar.

- Garraghan, G. J. (1948). *Guide to historical method*. New York: Fordham University Press.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti sejarah (pengantar metode sejarah)*. Terjemahan oleh Nugroho Notosutanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gunawan, A. (1995). *Kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hagul, P. et al. (1989). *Penentuan variabel penelitian dan hubungan antar variabel "metode penelitian dan survey"*. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (Ed). Jakarta: LP3ES.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harnovinsah. (2017). *Metodologi penelitian (modul 5)*. Universitas Mercu Buana: Pusat Bahan Ajar dan E-learning.
- Hasbullah. (2006). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasbullah. (2012). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Herlina, N. (2008). *Metode sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hidayat, R. & Abdillah. (2019). *Ilmu pendidikan: konsep, teori dan aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Hoetomo. (2005). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Imam, H. (2009). *Teori-teori politik*. Malang: Setara press.
- Joeniarso. (2000). *Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kahin, G. M. (2005). *Southeast: A Testament*. New York, Taylor and Francis a library.
- Kartodirjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kodam Siliwangi VI. (1968). *Siliwangi dari masa ke masa*. Jakarta: Fakta Mahjuma.
- Komariah, A. & Satori, D. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Maksum. (1999). *Madrasah: sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: Pen. PSH UII.

- Mardalis. (1999). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan publik: pelayanan administrasi terpadu kecamatan*. Bandung: Indra Prahasta.
- Mestoko, S., Bachtiar, S., Sunityo., & Arif, Z. (1986). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai pustaka.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2012). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke pemikiran politik*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, R. (2008). *Pendidikan Indonesia: harapan, visi, dan strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pradipto, Y. D. (2007). *Belajar sejati vs kurikulum nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanto, M. G. (1989). *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Riduwan. (2010). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i, M. (2011). *Sejarah pendidikan nasional dari masa klasik hingga modern*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Rifa'i, M. (2016). *Sejarah pendidikan nasional: dari masa klasik hingga modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia modern: 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Rohman, A. (2009). *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Said, M. (1981). *Pendidikan abad keduapuluh dengan latar belakang kebudayaannya*. Jakarta: Mutiara.
- Sirozi, M. (2005). *Agenda setrategis pendidikan Islam*. Yogyakarta: AK Group.

- Sjamsuddin, H. (1993). *Sejarah pendidikan di Indonesia: zaman kemerdekaan 1945-1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sjamsuddin, H. (1996). *Metodologi sejarah*. Jakarta: Depdikbud Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soejipto & Kosasih, R. (2009). *Profesi keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., Aman., Kumalasari, D., Sutopo., & Nuryanto, A. (n.d). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta: Tim UNY.
- Suharno & Retnoningsih. (2006). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suradi., Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah pemikiran pendidikan dan kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surahmad, W. (1982). *Pengantar penelitian ilmiah dasar*. Bandung: Teknik Tarsito.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Syahrudin, S & Susanto, H. (2019). *Sejarah pendidikan Indonesia (era pra kolonialisme nusantara sampai reformasi)*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tirtarahardja, U. & La Sulo, S. L. (2005). *Pengantar pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht, E. (1963). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: PT. Ikhtiar.
- Wiryanto. (2004). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widasarana Indonesia.
- Yamin, M. (2009). *Manajemen mutu kurikulum pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Tim Peneliti Penulisan Sejarah Kabupaten Subang. (1980). *Hari Jadi Kabupaten Subang dengan latar belakang sejarahnya*. Subang: Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Subang.

2. Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia. No.420 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 130/B tgl. 29 September 1949. Pemberian tunjangan belajar kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan dan mahasiswa perguruan tinggi negeri.

Arsip Nasional Republik Indonesia. No.478. Undang-Undang No. 32 tgl. 22 September 1947. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan negeri.

Marpaung, N. M. I. B. (1995). Inventaris arsip sekretariat negara RI 1945-1949. *Arsip Nasional RI*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003*. Jakarta.

3. Jurnal

Agustina, S. (2014). Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sitem pemerintahan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5 (2).

Aisy, S. R. & Hudaidah. (2021). Pendidikan Indonesia di era Awal Kemerdekaan sampai Orde Lama. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3 (2), 569-577.

Asrori, M. (2015). Tinjauan historis pengaruh kebijakan politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (1), 56.

Dangu, A. S., Sumarjiana, I. K. L., & Anto, R. (2022). Sejarah pendidikan Indonesia awal kemerdekaan tahun 1945-1950. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3 (2), 3.

Datumula, S. (2020). Peraturan kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1 (2), 56-78.

Fadli, M. R. & Kumalasari, D. (2019). Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama (periode 1945-1966). *Jurnal Agastya*, 9 (2).

Hartono, Y. (2017). Pendidikan nasional dan kualitas manusia Indonesia dalam perspektif sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 7 (1), 84-102.

- Hartono, Y. (2015). Riset di bawah Kemenristek-Dikti (prospek dan tantangan). *Jurnal Agastya*, 5 (1).
- Haryanah, N. (2004). Rekonstruksi sistem pendidikan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa. *None* 20 (4), 540-554.
- Herdiani, E. (2016). Metode sejarah dalam penelitian tari. *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan, ISBI Bandung*, 2 (2).
- Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3 (2).
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (2).
- Ismail. (2016). Politik pendidikan islam orde lama 1945-1965 (study kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan islam). *Kabilah: Journal of Social Community*, 1 (1), 139-169.
- Kumalasari, D. (2010). Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Taman Siswa (tinjauan humanis-religius). *Jurnal Istorica*, 3 (1), 5.
- Mudzakir. (2015). Pendidikan Islam masa Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Al-Fatih*, 4 (1), 55-66.
- Nambo, A. B. & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21 (2), 267.
- Nir, A.E. & Kafle, B.S. (2011). The effect of political stability on public education quality. *International Journal of Educational Management*, 27 (2).
- Palupi, S. & Kumalasari, D. (2018). Dinamika kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1945-1965. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5 (5).
- Purwanto, N. A. (2008). Pengaruh politik dalam bidang pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2 (4).
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 agustus 1945: revolusi politik bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2 (1), 143.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya pada sistem pendidikan nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7 (1).
- Supendi, P. (2016). Variasi (format) sistem pendidikan di Indonesia. *Jurnal Almufida*, 1 (1).
- Umar, M. S. (2013). Kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 16 (2).

- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1 (1).
- Soetarno. (2004). *Sumber daya pendidikan dengan pendekatan sistem*. Surakarta: UMS.
- Zulaicha, L. (2007). *Metologi Sejarah*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB).
- Zulkarnain. (n.d). *Sejarah Tatanegara*. Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial.
- Zulkarnain. (2009). Ketatanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan. *Jurnal Istoria*, 7 (1).

4. Tesis

- Hadiana, D. (2018). *Subang masa Revolusi Fisik (1945–1949)*. (Tesis, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati).
- Susanto. (2016). *Pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional*. (Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

5. Skripsi

- Afdhal, M. F. (2021). *Pengaruh city branding “Kota Santri dan Ulama” terhadap minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Parepare*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Fitriani, E. (2016). *Implementasi pendidikan akhlak di Kuttab Al-fatih Semarang*. (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang).

6. Artikel

- Dagblad Amigoe Di Curacao*. (1946, januari 22). *Curacao, The Netherlands*.
- Kemendikbud-Ristekdikti. (2015). *Nama kementerian/departemen pendidikan yang menangani pendidikan*. Jakarta.
- Sularso, P. (n.d). *Soekarno Menganangkan Indonesia Buta Huruf Bertujuan Rakyat Indonesia Gemar Membaca*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.